



BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

ROAD MAP

DEPUTI BIDANG INVESTIGASI TAHUN 2015-2019



2. Pengawasan atas current issue

Deputi Bidang Investigasi:

- a. Merespon isu-isu yang menjadi perhatian Presiden/Pimpinan;
- b. Respek terhadap isu-isu strategis baik tingkat lokal maupun nasional untuk segera berkoordinasi dengan pihak terkait agar segera ditindaklanjuti, dan
- c. Membantu Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, dan Korporasi dengan memberikan solusi atas permasalahan yang menghambat pelaksanaan program/kegiatan pemerintah.

Langkah kerja peta jalan ini diuraikan pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1 Langkah Kerja Pengawasan Intern Bidang Investigasi dalam rangka Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Negara dan Pembangunan Nasional

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
1 Penyusunan/revisi Pedoman Pengelolaan Kegiatan Bidang Investigasi (PPKBI)					
2 Pengawasan atas Percepatan Program Strategis Nasional					
3 Pengawasan current issue					
4 Pengawasan keinvestigasian atas pengelolaan keuangan negara/daerah (KLPK)					
5 Pengawasan yang diminta oleh KLPK untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan dan korporasi baik dan bebas KKN					
6 Melakukan kajian peraturan yang berindikasi menghambat kelancaran pembangunan dan merugikan keuangan negara <ul style="list-style-type: none">• Perlu perubahan pendekatan yang lebih proaktif dengan metode evaluasi kebijakan					

proses interaksi peserta belajar dengan BPKP dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar dimana BPKP berperan dalam membantu, mendorong dan memfasilitasi peserta belajar agar dapat memperoleh pengetahuan dan menguasai ketrampilan/keahlian mengenai anti korupsi serta merubah sikap peserta belajar menjadi anti korupsi berdasarkan usaha peserta belajar.

Penilaian budaya organisasi anti korupsi merupakan instrumen pencegahan korupsi yang fokus pada intervensi terhadap budaya. Instrumen ini melengkapi instrumen FCP yang merupakan intervensi terhadap sistem dalam organisasi dan MPAK yang mengintervensi faktor manusia. Penilaian budaya organisasi anti korupsi merupakan jawaban dari keterbatasan SPIP dalam mengatasi dua hal yang justru merupakan akar penyebab (*root cause*) dari korupsi yaitu: 1) pengabaian pengendalian intern secara sengaja oleh pimpinan (*management override*), dan 2) pimpinan, pegawai dan/atau pihak ketiga lainnya berkolusi untuk mengelak dari sistem pengendalian intern.

Langkah kerja pembinaan penyelenggaraan SPIP yang fokus pada pencegahan korupsi dan kecurangan diuraikan pada Tabel 2.2.

**Tabel 2.2 Langkah Kerja
Pembinaan Penyelenggaraan SPIP Fokus pada Pencegahan Korupsi dan
Kecurangan**

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
1 Penyusunan/revisi pedoman					
a. Pedoman FCP					
b. Masyarakat Pembelajar Anti Korupsi (MPAK)					
c. Penilaian Budaya Organisasi Anti Korupsi					
2 Pelaksanaan penugasan FCP					
3 Pelaksanaan <i>Fraud Risk Assessment</i> (FRA)					
4 Implementasi Masyarakat Pembelajar Anti Korupsi (MPAK)					
5 Implementasi Penilaian Budaya Organisasi Anti Korupsi (PBOAK)					
6 Analisis Akar Penyebab Masalah dan kajian pengawasan atas suatu program/kegiatan untuk mencegah terjadinya TPK berulang					
a. Dilaksanakan sesuai SE Deputi dan PPKBI					
b. Implementasi Root Cause Analysis (RCA)					
c. Penggunaan RCA untuk mengidentifikasi suatu permasalahan.					

2.3 Peningkatan Kapabilitas APIP di Bidang Investigasi

Peta jalan ini dilakukan dalam bentuk kegiatan edukatif di bidang investigasi dan pelibatan APIP dalam kegiatan MPAK. Deputi Bidang Investigasi mendorong keikutsertaan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) lainnya dalam menangani pengaduan/temuan hasil audit rutin secara proporsional. Dalam rangka meningkatkan peran APIP, Deputi Bidang Investigasi akan berupaya meningkatkan kompetensi APIP di bidang investigasi dan melibatkan APIP dalam pengembangan masyarakat pembelajar anti korupsi.

Langkah kerja peningkatan kapabilitas APIP diuraikan pada Tabel 2.3.

**Tabel 2.3 Langkah Kerja
Peningkatan Kapabilitas APIP Bidang Investigasi**

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
1 Penyusunan/revisi pedoman					
a. Pedoman workshop					
b. Pedoman kegiatan edukasi lainnya					
2 Penyelenggaraan workshop / kegiatan edukasi lainnya untuk APIP secara berkelanjutan					
a. Perbaikan database peserta					
b. Peta kompetensi peserta					
3 Pelibatan APIP dalam kegiatan Masyarakat Pembelajar Anti Korupsi (MPAK)					
a. Sebagai peserta belajar					
b. Sebagai sumber belajar					

Pengembangan kompetensi di bidang investigasi bagi auditor APIP lainnya bertujuan untuk memberikan bekal pengetahuan, keterampilan dan sikap (*hard competencies* dan *soft competencies*) kepada peserta diklat dalam melaksanakan kegiatan pendeteksian dan pencegahan korupsi di KLPK. Workshop perlu dilakukan secara berjenjang (tingkat *basic*, *intermediate* dan *advance*) terutama untuk kompetensi di bidang audit investigatif.

Mengingat pertimbangan risiko gugatan hukum, upaya peningkatan kapabilitas APIP di bidang investigasi tidak mencakup kegiatan *quality assurance* (QA) atas kegiatan audit investigatif / audit tujuan tertentu lainnya yang dilakukan oleh APIP lainnya.